

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara

Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan

Penyunting:

Tamrin

Tulus

Erika Revida

Aldy Safruddin Rambe

Erna Frida

 **USUpress**

2023

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara: Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan/Penyunting: Tamrin [et.al] – Medan: USU Press, 2023.

viii, 197. ; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN:

Dicetak di Medan



SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho Allah SWT, buku pemikiran guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2023 yang berjudul “*Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan*” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sudah menjadi kewajiban seorang guru besar untuk selalu menulis karya ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun dalam bentuk buku ajar, referensi, *book chapter* dan yang lainnya. Buku ini merupakan salah satu wadah bagi guru besar USU untuk membiasakan diri dalam menulis karya ilmiah khususnya memberikan masukan/pemikiran-pemikiran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya di Sumatera Utara.

Sustainable tourism merupakan salah satu poin penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan terlaksananya *Sustainable development goals* mengharapkan pembangunan pariwisata semakin berkembang dan maju. Disadari bahwa pembangunan pariwisata saat ini merupakan sektor yang menjanjikan bagi pemerintah dan masyarakat. Pariwisata mempunyai dampak yang luas dan *multiplier effect* bagi pembangunan di hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Selain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mencegah urbanisasi, mencintai budaya sendiri dan melestarikan lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

Masyarakat adalah subjek dan objek pembangunan pariwisata. Sebagai subjek (pelaku) pembangunan pariwisata, masyarakat mempunyai peranan penting dan menentukan, sebab masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi serta sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu masyarakat sebagai subjek (pelaku) pembangunan pariwisata perlu diberdayakan dengan berbagai cara agar dapat lebih berperan dalam pembangunan baik pembangunan pariwisata baik di desa/daerahnya maupun pembangunan di kancah nasional dan bahkan internasional.

Buku ini diharapkan berguna bagi yang berkepentingan dan semoga buku pemikiran para guru besar Universitas Sumatera Utara tahun 2023 ini dapat menjadi stimulus/pendorong bagi para guru besar di lingkungan USU

pada umumnya dan civitas akademika untuk selalu membiasakan diri dalam menulis karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Selamat kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang telah menyelesaikan pembuatan buku pemikiran guru besar USU tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan, September 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

**Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si.**



SAMBUTAN PIt. KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Assalamualaikum Wr Wb,

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023 ini telah berhasil menerbitkan buku yang berisi tentang pemikiran para Guru Besar USU yang berjudul “*Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan*”.

Pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah (pendapatan asli daerah) serta pendapatan nasional melalui devisa negara. Selain itu pariwisata dapat mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mencegah urbanisasi, meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan pariwisata berkelanjutan atau yang disebut dengan istilah *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* berorientasi pada selain peningkatan ekonomi, sosial budaya dan berbasis lingkungan. Pembangunan pariwisata yang memperhatikan masa depan bangsa dan tidak boleh merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu *sustainable tourism* telah menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs).

Keberhasilan *sustainable tourism* sangat tergantung pada peran serta (partisipasi) masyarakat. Masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan pariwisata. Sebagai subjek pembangunan masyarakat dituntut untuk lebih berperan serta dan berada di garda terdepan dalam mensukseskan pembangunan pariwisata yang pada gilirannya dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar lebih mandiri dan berperan dalam pembangunan pariwisata di daerah/desanya.

Buku ini merupakan salah satu wadah bagi para guru besar USU untuk menyumbangkan pemikirannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan *sustainable tourism*. Semoga buku ini dapat menjadi mendorong para guru besar USU untuk lebih rajin lagi menulis karya ilmiah.

Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Rektor USU dan jajarannya yang telah memberikan dana dalam penerbitan buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para guru besar USU yang telah berpartisipasi dalam menulis buku ini. Akhirnya saya ucapkan semoga Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan.
Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.

Medan, September 2023
Plt Ketua DGB USU



Prof. Dr. Tamrin, MSc.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	iii
SAMBUTAN PIt. KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.....	v
DAFTAR ISI	vii
1. Pengembangan Objek Wisata Alternatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba Abdul Rauf	1
2. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan Blondina Marpaung	9
3. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan Elmeida Effendy	17
4. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Mengentaskan Kemiskinan Erika Revida	24
5. <i>Sustainable Tourism</i> dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan Evawany Y. Aritonang	33
6. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Harry Agusnar	40
7. <i>Sustainable Tourism</i> dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Irnawati Marsaulina	53
8. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia dan Upaya Bangkit Kembali Pasca Pandemi Iskandar Muda Damanik.....	62
9. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Sustainable Tourism untuk Mengentaskan Kemiskinan Juliati Br. Tarigan.....	71
10. Kompetensi Komunikasi Dalam Pemasaran Coffee Shop Di Era Digital Lusiana Andriani Lubis	80

11. Tantangan Dan Prospek Sustainable Ecotourism Di Hutan Mangrove Sumatera Utara Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mohammad Basyuni.....	90
12. Sustainable Tourism Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Muhammad Fidel Ganis Siregar.....	95
13. Strategi Destinasi Wisata Danau Toba dengan Pemberdayaan Masyarakat Noverita Sprinse Vinolina	108
14. Sustainable Development Pembangunan Pariwisata Dalam Pengentasan Kemiskinan : Pengembangan Potensi Budaya Wisata Kuliner Pasar Kamu (Pekan Sarapan Karya Anak Muda) Desa Denai Lama, Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Pujiati	116
15. Sustainable Tourism: Suatu Pemikiran Untuk Pengelolaan Wisata Danau Toba Rahmawaty	132
16. Disain Pengembangan Potensi Usaha Kecil Menengah Dalam Mengwujudkan Daerah Wisata Foods Halal Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Ramli.....	146
17. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan Sarman Nursani L. Raja	155
18. Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengetaskan Kemiskinan (Perspektif Komunikasi) Suwardi Lubis.....	167
19. Pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan T. Silvana Sinar.....	174
20. Landak River Wisata Sungai Dan Alam Berbasis Mitos Dan Peleraian Konflik Wan Syaifuddin.....	183
21. Pembangunan Berkelanjutan Parawisata Pesisir Pantai Timur Sumatera Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Zulkifli Nasution.....	191

Pengembangan Objek Wisata Alternatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba

Abdul Rauf
Fakultas Pertanian

1. Latar Belakang

Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba merupakan daerah yang mempunyai potensi keindahan alam dan sumber daya manusianya. Keindahan alam dan panorama kawasan Danau Toba, kekayaan seni budaya asli merupakan potensi keindahan alam dan dikembangkan dalam upaya pengembangan kepariwisataan di tanah air. Potensi alam tersebut diantaranya adalah luasnya lahan kosong yang dapat diolah menjadi areal pertanian, peternakan, perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, perlu secara berkesinambungan perlu mewujudkan pelestarian dan pengembangan aset serta potensi seni budaya dan sejarah daerah yang memberikan penguatan pada ketahanan budaya masyarakat dan pengembangan pariwisata daerah. Sejalan dengan itu diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat; Pengembangan kapabilitas lembaga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mendukung pembangunan daerah; Peningkatan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja; serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, DTA Danau Toba yang selama ini memiliki potensi wisata pemandangan (Danau Toba), dapat dikembangkan objek wisata ke dalam wisata akademik (penelitian) berupa pendataan kerusakan alam, wisata konservasi (reboisasi lahan kritis) serta wisata pendidikan (pengembangan sumberdaya masyarakat). Wisata pemandangan di wilayah ini dimungkinkan dengan lokasinya yang berada di seputar Danau Toba, disertai pemandangan alam pegunungan. Banyak desa yang dapat melihat pemandangan alam Danau Toba. Wisata penelitian, dimungkinkan dengan banyaknya daerah yang tergolong mengalami kerusakan berupa lahan kritis, sehingga perlu kajian pendataan secara spasial tentang luas, posisi, penyebab dan dampaknya. Wisata penelitian yang menarik adalah pendataan tentang tanaman endemik seperti kemenyan dan andaliman, baik speciesnya, habitatnya maupun teknik budidayanya.

Wisata konservasi dan pendidikan diberikan dengan membuat gamabaran pengelolaan berbagai kondisi lahan (kemiringan dan kesbiuran) dengan berbagai teknik konservasi, baik secara fisik, vegetasi maupun

pemberian amandemen. Konservasi kehidupan masyarakat Toba yang kental dengan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehingga ekowisata ini berbasis pada ketiga unsur ini yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat. Daerah ekowisata konservasi dan pendidikan, seyogyanya merupakan bagian kecil dari sub DAS yang ada, sehingga pengelolaannya merupakan perpaduan kompleks kondisi lahan dan tindakan pengelolaan lahan dalam upaya mengkonservasi tanah dan air. Semakin beragam kondisi lahan, akan semakin baik bagi ruang pendidikan dan objek ekowisata. Dengan kondisi perekonomian, kondisi wilayah dan lahan, maka ekowisata yang layak dilaksanakan di daerah studi adalah, ekowisata yang bernilai, konservasi, pendidikan dan wisata alam.

2. Masalah

Permasalahan dalam pengembangan objek wisata alternatif di DTA Danau Toba diantaranya: belum tumbuhnya kultur masyarakat sadar wisata; keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) yg kompeten dan professional di bidang industri jasa wisata alam atau wisata non-pemandangan; keterbatasan dukungan pembiayaan dari pemerintah; serta kurangnya infrastruktur pendukung.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Mengembangkan potensi pariwisata bersifat ekowisata dengan dukungan perguruan tinggi; Membangun industri ekowisata sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat berbasis pertanian, perikanan dan kehutanan; Memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam pengembangan, memperkenalkan dan promosi ekowisata; Membangun ekowisata yang khas, unik, genuine sesuai kekhasan daerah dengan budayanya yang tinggi didukung inovasi yang terus dilakukan; Membangun SDM yang kompeten bagi aparaturnya maupun masyarakat yang sadar wisata; Membuat roadmap yang jelas pengembangan ekowisata untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari pusat dan dukungan dan sinergitas dari SKPD lainnya; Mendorong dukungan pemerintah dalam penguasaan infrastruktur pendukung bagi pengembangan industri ekowisata serta insentif yang menarik kepada investor.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Setiap wilayah di DTA Danau Toba memiliki potensi untuk dikembangkan potensi wisata alternatif, terutama dalam pengembangan desa ekowisata. Hal ini sangat tergantung pada kreativitas manusianya. Untuk itu, dalam pengembangan desa ekowisata adalah melakukan identifikasi potensi. Pengembangan objek wisata alternatif memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan harus menggabungkan beberapa

aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, dan tingkat resistensi komunitas lokal.

Proses memetakan potensi wilayah dilakukan melalui rembuk warga/musyawarah seluruh komponen desa dari berbagai kalangan, baik itu perangkat desa, kelompok perempuan, kelompok pemuda, maupun kelompok lainnya. Beberapa kelompok potensi yang dapat dipetakan. Di antaranya adalah; apa yang bisa dilihat (something to see), apa yang bisa dilakukan (something to do), apa yang bisa dimakan (something to eat) , dan apa yang bisa dibeli (something to buy).

Pengembangan potensi ekowisata layak melibatkan profesional atau konsultan/ perguruan tinggi untuk menyusun masterplan, memberikan pelatihan, maupun melakukan pendampingan. Karena itu perlu juga memetakan kampus-kampus yang potensial di sekitar desa wisata untuk dapat dilibatkan dalam program penelitian maupun pemberdayaan masyarakat. Proses konsultasi juga dapat dilakukan dengan melakukan studi banding ke desa wisata yang sudah berhasil. Derah tangkapan air Danau Toba dengan kondisi lahan beragam baik dari segi bentuk relief lahan, kekritisian lahan, kemiringan lereng dan penutupan lahan memerlukan kajian yang seksama guna menetapkan lokasi ekowisata yang dapat mendampingi wisata pemandangan indah Danau Toba.

5. Rencana Tindak Lanjut

Konsep objek wisata alternatif yang dapat didesain bukan merupakan wisata massal tetapi lebih menekankan pada aspek pendidikan dan kebudayaan. Salah satu dari sekian banyak objek wisata alternatif adalah agroekowisata. Dalam objek wisata ini wisatawan akan menjalani perjalanan melalui jalur-jalur dan melakukan interpretasi lingkungan secara mandiri maupun dibimbing oleh pemandu. Masyarakat yang mendatangi lokasi ini akan diajak berkeliling untuk menikmati relasi antara hutan dan kebun, terutama kebun kopi. Rangkaian wisata pendidikan yang dapat dibangun diantaranya: (1) pengolahan biji kopi (tradisional dan modern), (2) budiaya kebun kopi dan hutan, (3) hutan (arboretum) pola pohon asuh, (4) menikmati seduhan kopi tradisional Toba dengan pemandangan Danau Toba.

1. Pengolahan Biji Kopi

Bagi sebagian orang, pengolahan biji kopi merupakan sesuatu yang menarik dan menjadi obyek wisata pendidikan. Pengunjung tidak hanya menyaksikan, tetapi menjadi pelaku dan dapat menikmati hasil pekerjaannya. Di lokasi project akan dibangun atau memanfaatkan bangunan yang sudah ada sebagai tempat untuk pengolahan biji kopi. Pengunjung memasuki area pengolahan biji kopi, dan secara langsung dapat mengerjakan tahapan-tahapan pengolahan biji kopi. Pengolahan biji kopi yang ditawarkan adalah

secara tradisional maupun secara modern sampai biji kopi siap dipasarkan. Pengunjung bisa membawa hasil olahannya untuk dibawa pulang.



Gambar 1. Pengolahan biji kopi secara tradisional menarik sebagai bahan pembelajaran

2. Budidaya Kebun Kopi dan Pohon

Setelah mengetahui dan mempraktekkan pengolahan biji kopi, pengunjung tentu penasaran ingin tahu bagaimana memanen atau memetik langsung biji kopi. Pengunjung akan dibawa ke lokasi kebun kopi dimana kebun kopi ini dibudidayakan dengan system agroforestry. Pengunjung akan ditunjukkan fungsi dan peranan pohon terhadap budidaya kopi. Selain itu pengunjung akan melakukan pemanenan dan sekaligus dapat merasakan fungsi pohon di kebun kopi.



Gambar 2. Pola penanaman agroforestry kopi dan tegakan pohon (Sumber Kompas 2018, dan Samsuri 2020)

3. Kedai Kopi View Danau Toba.

Setelah lelah berkeliling dan praktek mengelola proyek agroforestry, pengunjung akan dibawa ke pusat bisnis hasil agroforestry. Salah satu hasil agroforestry yang dapat dinikmati adalah seduhan kopi secara tradisional. Airnya panas bahan kopi direbus dengan kayu bakar dari hasil agroforestry, dan diseduh secara tradisional. Cara menikmatinya (meminumnya) juga ditemani dengan kue atau makanan tradisional sambil memandangi view Danau Toba.



Gambar 3. Menikmati kopi sambil menikmati view agroforestry kopi dan hutan lindung



Gambar 4. Desain tapak salah satu alternatif agroekowisata di DTA Danau Toba

Pentahapan penataan desa ekowisata secara berkala dalam perencanaan tahunan dan jangka panjang di DTA Danau Toba dapat disusun Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan ekowisata selama 5 tahun sebagai berikut:

Program	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Desain	Menetapkan lokus ekowisata berbasis mapping potensi eko dan destinasi wisata	Pembangunan tahap awal	Membangun kekhasan produk dan jasa yang unik	Mantapkan keunikan dan standarisasi layanan	Mantapkan standarisasi layanan dan pengembangan produk

Program	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Regulasi	Menyusun, menetapkan dan sosialisasi regulasi insentif dan disinsentif ekowisata	Mengundang investor untuk berpartisipasi dalam membangun ekowisata	Membangun atmosfer yang kondusif berupa proteksi dan promosi	Mantapkan atmosfer yang kondusif untuk pengembangan	Mantapkan atmosfer yang kondusif untuk pengembangan
Infrastruktur	Susun rencana dukungan infrastruktur dan peran SKPD lainnya	Membangun infrastruktur dasar khususnya akses jalan	Membangun infrastruktur lanjutan fasilitas umum	Bangun infrastruktur lanjutan fasilitas umum	Fasilitasi kemudahan untuk kembangkan infrastruktur
Sumberdaya Manusia	Melakukan pelatihan SDM aparatur dan masyarakat	Melakukan pelatihan sdm aparatur dan petani	Standarisasi kompetensi SDM aparatur dan petani	Mantapkan kompetensi SDM aparatur dan petani	Mantapkan kompetensi SDM aparatur dan petani
Kelembagaan	Membuat desain dan mengembangkan kelembagaan kemitraan	Membangun kelembagaan kemitraan dan bangun <i>branding</i>	Memantapkan kelembagaan kemitraan dan bangun <i>branding</i>	Mantapkan kelembagaan kemitraan dan bangun <i>branding</i>	Bangun keberlanjutan kemitraan yang berkeadilan
Penelitian dan Pengembangan	membangun dan menemukan serta merencanakan inovasi dan kreasi produk yang unik	Membangun dempolt untuk inovasi dan kreasi produk yang unik	Memantapkan dempolt untuk inovasi dan kreasi produk yang unik	Menemukan dan ujicoba hasil inovasi dan kreasi produk yang unik	Terapkan teknologi hasil inovasi di lapangan

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Danau Toba maka diperlukan objek wisata alternatif yang dapat dinikmati dan dikunjungi, sehingga berbagai pengalaman dan kesan berwisatanya bisa beragam dan tidak membosankan. Objek wisata alternatif yang bisa dibangun di DTA Danau Toba sangat beragam, baik berupa wisata pendidikan, penelitian, budaya, pertanian, kehutanan dan tetumbuhan endemik.

Saran

Pengembangan objek wisata alternatif di DTA Danau Toba harus berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga objek wisata bersekala mikro (individu, kelompok, dusun, atau desa) tetap dapat dikembangkan sekaligus dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah memfasilitasi dengan membangun sarana prasarana dan infrastruktur transportasi. Penggunaan dan penyaluran dana CSR dari perusahaan BUMN, BUMS, atau BUMD sangat membantu mendukung pengembangan objek wisata alternatif berbasis pemberdayaan masyarakat di DTA Danau Toba,

Daftar Pustaka

- Abdul-Rauf. 2017. Sistem Agroforestry; Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan. Edisi Revisi. USU Press.
- Abdul-Rauf, Rahmawaty, B. Slamet, Y. Hidayat, dan H. Santuri, 2013. Pengelolaan DAS; Sebuah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu DAS Asahan Toba. USU Press, Medan.
- Abdul-Rauf, Samsuri, Rahmawaty, B.Slamet. Rahmanta, dan Supriadi. 2021. Kajian Implementasi Hasil Studi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai Asahan Hulu. LPPM USU-Perum Jasa Tirta I.
- Dishut-SU, 2019. Rancangan Awal Renstra Dinas Kehutanan 2018 – 2023. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. <http://dishut.sumutprov.go.id/blog/wp-content/uploads/2019/11/RENSTRA-2018-2023-FULL.pdf>
- Gischa, S., 2022. Pengertian Agrowisata, Manfaat, dan Prinsipnya. <https://www.kompas.com>.
- Riadi, M., 2019. Ekowisata; Pengertian, Prinsip, Karakteristik dan Jenis. <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/ekowisata-pengertian-prinsip-karakteristik-dan-jenis.html>
- Salim, A., Calfer, C.J.P., dan McDougall, C. 1999. Panduan Cara Pemberian Skor dan Analisis untuk Menilai Kesejahteraan Manusia. CIFOR. Bogor.
- Sinukaban, N., H. Pasaribu, dan O. Siagian. 2001. Pengelolaan Danau Toba: Peluang dan Ancaman. Prosiding Seminar Nasional MKTI di Medan, 25-27 Mei 2000. Hal. 11-23.

Biodata Penulis



Abdul Rauf, Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara lahir di Binjai, 17 September 1959. Pendidikan S1 (Ir.) pada Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) lulus pada tahun 1985. Pendidikan S2 (MP) juga dalam bidang Ilmu Tanah di UGM Yogyakarta, lulus pada 1994, melanjutkan pendidikan S3 (Dr.) di bidang yang sama di IPB Bogor, lulus tahun 2004. Bidang Ilmu Tanah yang didalamnya adalah Konservasi Tanah dan Air serta Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan telah diembannya sejak tahun 1986 (sebagai staf pengajar di beberapa PTS di Medan) dan sejak 1987 hingga sekarang sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian USU, dan sejak tahun 2004 melengkapi pengabdianya sebagai staf pengajar di Program Pascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian USU. Selain berperan sebagai staf pengajar dan narasumber pada berbagai seminar, pelatihan dan lokakarya, penulis juga aktif menulis buku teks (ISBN) diantaranya: Dasar-Dasar Pengelolaan DAS (USU Press), Sistem Agroforestry, Upaya Pemberdayaan Lahan Secara Berkelanjutan (2011) dan edisi revisinya (2017) (USU Press, 2017), Profil Arboretum USU 2006-2008 (USU Press, 2009), Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Asahan Toba (USU Press); Pengelolaan DAS, Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Batang Gadis (CI-Jakarta); Teknologi Pemanfaatan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS (USU Press, 2016); Tanah Sulfat Masam dan Pengelolaannya Secara Biologi (USU Press); Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan (USU Press, 2018); Optimalisasi Lahan Pertanian Menggunakan Agen Biomassa (USU Press, 2019); Ekspedisi DAS Wampu Sumatera Utara (USU Press, 2019); Menelusuri DAS Singkil dari Hulu ke Hilir (USU Press, 2019); Budidaya Padi di Tanah Salin (UMSU Press, 2020); dan Sains Biofisik dan Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an (USU Press, 2020). Beberapa organisasi profesi yang aktif diikuti oleh penulis diantaranya sebagai Pengurus Pusat Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI), Pengurus Komisariat Daerah Sumatera Utara Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), anggota Himpunan Gambut Indonesia (HGI), Ketua Forum DAS Wampu Sumatera Utara, Pengurus Forum Koordinasi DAS Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (KP3K) Kabupaten Deli Serdang; Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (PERWAKU) Wilayah Sumatera Utara.

Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan

Blondina Marpaung
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya menggenjot pendapatan asli suatu daerah dan meningkatkan pemasukan devisa negara lewat sektor kepariwisataan, berbagai terobosan dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata termasuk melibatkan masyarakat yang ada di kawasan wisata.

Tahun 2019 lalu, sebanyak 20 juta wisatawan asing ditargetkan berkunjung ke Indonesia. Selama proses pembangunan sektor pariwisata, hendaknya memperhatikan dampak lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Oleh karena itu sangat penting kiranya untuk menerapkan sustainable tourism development.

Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhatikan dampak lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016, dijelaskan tentang pedoman pembangunan destinasi wisata berkelanjutan yang diadaptasi dari subdefinisi UNWTO dan standarisasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Pemerintah berharap pada tahun 2030, pariwisata Indonesia telah benar-benar menerapkan sustainable tourism.

Dalam pengelolaan pariwisata hendaknya tidak memikirkan keuntungan saat ini saja, melainkan keberlanjutan jangka panjang yang sesuai dengan realitas dan ruang lingkungannya, meliputi lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, kualitas, masalah kesehatan dan keselamatan.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pandangan atas dampak dari pengembangan pariwisata di suatu negara. Pariwisata yang dibangun dengan dasar mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya dipandang memiliki dampak destruksi terhadap lingkungan di destinasi, baik yang bersifat alam maupun sosial budaya.

Pembangunan pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara melalui kontribusi terhadap PDB Nasional. Jika pariwisata dapat dikelola secara baik, pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal lewat pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata.

Untuk itu, dalam pengembangan pariwisata, perlu diterapkan konsep pembangunan yang dapat meminimalkan dampak negatifnya, yaitu melalui konsep pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism).

Apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan? World Tourism Organization (WTO) menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah “tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment, and host communities”.

Penjelasan tersebut dapat didefinisikan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan/pengembangan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan.

Melalui penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep yang dipraktikkan, baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini tidak hanya penyedia layanan wisata saja, tetapi juga wisawatan serta komunitas tuan rumah maupun pemerintah setempat.

WTO dan United Nations Environment Program (2005) juga telah merumuskan setidaknya terdapat 12 tujuan utama dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Economic Viability, memastikan kelangsungan dan daya saing destinasi wisata sehingga mereka dapat menerima manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
2. Local Prosperity, memaksimalkan kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di lingkungan destinasi.
3. Employment Quality, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas/terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, termasuk juga dalam hal penerimaan upah, kesetaraan gender maupun ras.
4. Social Equity, memberikan distribusi yang luas dan adil dari manfaat ekonomi maupun sosial, termasuk juga meningkatkan peluang keterlibatan, pendapatan, dan layanan.
5. Visitor Fulfillment, untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, termasuk juga adanya pertukaran pengetahuan di dalam kegiatan wisata.
6. Local Control, melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan mengenai pengelolaan atau pengembangan pariwisata.
7. Community Wellbeing, menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat lokal, termasuk struktur sosial dan akses sumberdaya, fasilitas, dan sistem pendukung kehidupan.
8. Cultural Richness, menghormati dan meningkatkan kepedulian akan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi dan kekhasan dari komunitas tuan rumah di destinasi wisata.
9. Physical Integrity, menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap destinasi, baik perkotaan maupun pedesaan.
10. Biological Diversity, mendukung segala bentuk sistem konservasi kawasan alam, habitat, dan margasatwa.

11. Resource Efficiency, meminimalkan penggunaan sumberdaya yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan maupun pengoperasian fasilitas pariwisata.
12. Environmental Purity, meminimalkan pencemaran udara, air, dan tanah serta timbunan limbah oleh destinasi wisata dan wisatawan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, terdapat 4 (empat) pilar utama dalam pengembangan pariwisata.

Pilar ini juga menjadi kriteria yang telah dirumuskan oleh Badan Pariwisata Berkelanjutan Dunia (Global Sustainable Tourism Council), yang mencakup:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan (Sustainability Management)
2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal (Social-Economy)
3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung (Culture)
4. Pelestarian lingkungan (Environment)

Empat pilar di atas sejatinya sudah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Kepariwisataan kita, di mana kinerja pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga atas kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pelestarian sumber daya alam/lingkungan, pengembangan budaya, perbaikan atas citra bangsa serta identitas bangsa sehingga dapat mempererat kesatuan.

2. Masalah

Pembangunan sektor kepariwisataan ke depan perlu melibatkan warga masyarakat yang ada di daerah tujuan wisata. Pembangunan menimbulkan perubahan keadaan dan pergeseran peran pelaku, ada yang diuntungkan dan dirugikan. Pembangunan kepariwisataan juga seringkali melupakan penyelamatan lingkungan di sekitarnya.

Dalam prakteknya di lapangan, masyarakat seringkali melupakan standar pelayanan dan kebersihan makanan yang disajikan menyebabkan wisatawan enggan untuk datang kedua kalinya ke lokasi yang sama.

3. Pemikiran Pemecahan Masalah

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya dapat dilakukan melalui berbagai macam strategi. Salah satu strategi yang memungkinkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat yang secara konseptual memiliki ciri-ciri unik serta sejumlah karakter yang oleh Nasikun (2000:26-27) dikemukakan sebagai berikut:

1. Pariwisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti dan ciri-ciri unik dan karakter yang lebih unik diorganisasi dalam skala yang kecil, jenis pariwisata ini pada dasarnya merupakan, secara ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti yang dihasilkan oleh jenis pariwisata konvensional.
2. Pariwisata berbasis komunitas memiliki peluang lebih mampu mengembangkan obyek-obyek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas- komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal.
3. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari pariwisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam menikmati keuntungan perkembangan pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat.

Tantangan mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adalah memerlukan pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Pemberdayaan masyarakat pariwisata merupakan konsep yang mudah dilontarkan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan, karena konsep ini merupakan suatu konsep yang holistik dan terus menerus untuk digali dan diberdayakan yaitu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kaum manula (masyarakat lanjut usia) harus ikut dilibatkan dan dipahami.

Diberdayakan dalam arti filosofi hidup di masyarakat, pendidikan, keterampilan, sikap/tata krama, aturan bermasyarakat, adat, bahkan sampai pada penampilan masyarakat itu sendiri. Munculnya proses partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perefektif, Pertama; pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua; partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan marjinal menjadi berdaya dan mandiri.

5. Rencana Tindak Lanjut

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan dilepas untuk mandiri, dengan demikian pemberdayaan melalui satu proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Oleh karena pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan suasana, kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat untuk berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan keberdayaan dan kepariwisataan secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat juga tetap berpedoman pada WTO dan United Nations Environment Program (2005) yang telah merumuskan setidaknya terdapat 12 tujuan utama dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Pemberdayaan juga diharapkan dapat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Selain itu, masyarakat juga memiliki kepedulian dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat adalah dengan memperhatikan filosofi hidup di masyarakat perlu diarahkan dan diperhatikan, agar sesuai dengan filosofi pembangunan kepariwisataan karena apabila belum selaras akan menjadi ganjalan dan kendala. Mindset masyarakat dalam memandang tamu atau wisatawan harus diubah yang tadinya wisatawan sebagai saingan diubah menjadi aset dan sumber kehidupan.

Perlu disadarkan bahwa wisatawan yang datang adalah masyarakat yang membawa biaya/uang yang akan dibelanjakan dan dapat menambah kesejahteraan masyarakat dan akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Harus ditanamkan pada masyarakat bahwa tamu atau turis merupakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melayani agar tamu menjadi betah dan berlama-lama tinggal di tempat wisata.

Upaya lainnya adalah membenahi pendidikan sebagai media yang ampuh untuk menyiapkan generasi muda untuk melayani dan memenuhi kebutuhan informasi bagi wisatawan, baik informasi mengenai kondisi fisik daerah maupun kultural yang berkembang di masyarakat.

Pendidikan yang ditekankan adalah pendidikan yang dapat memelihara kelestarian objek dan budaya, agar menjadi aset dan jasa yang bisa dijual. Banyak informasi yang terkandung di lokasi pariwisata (objek) tidak dapat dijual karena keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat pariwisata. Bentuk pendidikan yang perlu dikembangkan baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Untuk dapat menjelaskan kepada wisatawan secara lengkap dan benar maka diperlukan pengetahuan dan ilmu yang cukup mengenai berbagai kondisi alam dan historisnya, sehingga menjadi bekal dan pengetahuan yang berguna bagi pengunjung.

Yang tak kalah pentingnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai kunci pengembangan kepariwisataan. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dalam menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, baik berupa keterampilan dalam menerima atau keterampilan dalam menyuguhkan berbagai atraksi maupun informasi yang dibutuhkan, sampai pada keterampilan dalam membuat berbagai cinderamata yang khas dan yang diminati oleh wisatawan.

Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sangat berkaitan erat dengan kreativitas dan ide-ide atau gagasan yang dimiliki oleh masyarakat, oleh karena itu pembinaan kreativitas harus selalu dipupuk dan dikembangkan.

Masalah sikap/tata krama juga sangat berkaitan dengan filosofi yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu apa bila filosofinya sudah disesuaikan maka sikap dan tata kramanya pun akan sesuai. Masyarakat yang ada di sekitar objek atau tempat wisata ibarat tuan rumah yang sedang menerima tamu. Apabila tuan rumah memiliki sikap dan tata krama yang baik akan menyebabkan tamu menjadi betah dan mau tinggal berlama- lama di tempat wisata.

Banyak kalangan yang memandang jika pariwisata berkembang maka aturan bermasyarakat semakin longgar dan rusak. Pandangan semacam ini keliru dan perlu diluruskan, mestinya aturan bermasyarakat dapat dikemas menjadi daya tarik wisata, dan kadang-kadang wisatawan merasa tertarik dan ingin mempelajari aturan bermasyarakat yang dipegang teguh.

Tidak berarti memaksa wisatawan untuk mengikuti aturan bermasyarakat yang ada di tempat wisata, tetapi menjadi media pendidikan bagi para wisatawan akan kemuliaan dan keunggulan aturan bermasyarakat yang dikembangkan.

Sama halnya dengan adat istiadat yang ada adalah merupakan aset wisata, sehingga adat yang baik perlu terus dikembangkan dan diperkenalkan. Misalnya berbagai kepercayaan atau upacara yang dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat. Banyak wisatawan yang ingin datang ke suatu lokasi wisata yang hanya tertarik oleh berbagai keunikan adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Adat biasanya muncul tidak serta-merta melainkan merupakan suatu hasil proses kehidupan bermasyarakat yang cukup panjang sepanjang kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga mengandung berbagai filosofi hidup dan mengandung nilai-nilai pendidikan yang luar biasa.

Dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, masyarakat juga perlu memperhatikan penampilan, karena penampilan ini merupakan akumulasi dari berbagai pemahaman dan pengetahuan termasuk keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, cerminan dari akumulasi tersebut akan nampak berupa penampilan sikap dan aura jiwa dari masyarakat tersebut.

Pencitraan berupa penampilan masyarakat maupun penampilan lingkungan yang ada juga merupakan suatu daya tarik yang tidak kalah pentingnya dalam mendatangkan dan ketertarikan wisatawan. Oleh karena itu perlu dipelihara dan dipertahankan terutama penampilan yang membuat wisatawan merasa aman, tenteram, dan menimbulkan semangat hidup untuk berkarya dan bersikap ke arah yang lebih baik.

6. Kesimpulan dan Saran

Secara umum peran masyarakat lebih menitikberatkan kepada partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan

pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik.

Pada dasarnya tidak semua masyarakat sudah mampu memberikan saran, kritik, ide dan sebagainya. Peran lain dapat digali adalah partisipasi dibidang pendanaan. Pengerahan dana masyarakat sering kali dilakukan sebagai perbandingan kemampuan masyarakat terhadap pendanaan dalam satu kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sumber pendanaan yang dihimpun masyarakat lebih populer disebut dengan swadaya masyarakat.

Peran masyarakat yang lain adalah memiliki fungsi pada kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan kepariwistaan. Dalam pengelolaan pariwisata hendaknya tidak memikirkan keuntungan saat ini saja, melainkan keberlanjutan jangka panjang yang sesuai dengan realitas dan ruang lingkungannya, meliputi lingkungan alam, sosial, budaya, ekonomi, kualitas, masalah kesehatan dan keselamatan.

Daftar Pustaka

- Atma Ras, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *SOCIUS XIV*, 56–63.
- Badan Pusat Statistik, 2019. Berita Resmi Statistik No.12/02/Th.XXII: Perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Desember 2018. Jakarta.
- Pilliang, Yasraf Amir, 1998, *Dunia Yang Dilipat Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*, Bandung: Mizan.
- Salim, Emil, 1983, *Manusia dan Lingkungan Hidup*, dalam M. Soerjani dan Bahrin Samad (ed), *Manusia dalam Keserasian Lingkungan*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekadijo, R.G., 2000, *Anatomi Pariwisata*, Jakarta Gremedia Pustaka Utama
- Santosa, SP. 2001. *Bahan Paparan untuk Gubernur Bali*. Mimeo
- Todaro, Michael, P, 1989, *Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga*, Erlangga Jakarta.
- Tjokrowinoto, M. 2005. *Pengurangan Kemiskinan Melalui Pariwisata: Perspektif Kebijakan Publik*. Dalam Damanik, J., H.A. dan Raharjana, D.T (Ed). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press:53.
- UNEP (United Nation Environment Programme). 2002. *Industry as Partner for Sustainable Development: Tourism*. UK: UNEP.
- WTO (World Tourism Organisation). 2004. *Tourism Barometer*. Madrid: WTO
- Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers. UNEP and UNWTO. 2005. p.11-12
- Konsep Pariwisata Berkelanjutan, <https://eticon.co.id/konsep-pariwisata-berkelanjutan/>

Biodata Penulis



Prof. Dr. dr. Blondina Marpaung, Sp.PD-KR merupakan Guru Besar Tetap Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU. Lahir di Kuala Simpang, 25 Maret 1962 anak pertama dari pasangan Alm. Prof. dr. Boloni, Sp. PD, K-GEH dan Masnida Ritonga, B. Sc. Menjalani Pendidikan di SD Immanuel Medan (lulus tahun 1974). SMP Immanuel Medan (lulus tahun 1977) dan SMA Negeri1 Medan (lulus tahun 1981). Memperoleh gelar dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (lulus tahun 1988). Mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis di Program

Studi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK USU (2000). Meraih gelar Konsultan Reumatologi (2004). Meraih gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2010) dan memperoleh jabatan Guru Besar sejak tanggal 1 Juni 2022. Menjabat sebagai Ketua Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam (2021 – Sekarang) dan Ketua *Indonesian Rheumatology Association* (IRA) cabang Medan. Menjadi anggota dan pengurus di berbagai organisasi profesi antara lain : Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA), Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI), *Asia Pacific League of Associations for Rheumatology* (APLAR), dan *International Osteoporosis Foundation* (IOF). Aktif melakukan berbagai penelitian dan kerjasama di dalam dan luar negeri, publikasi ilmiah, mengikuti seminar dan menjadi moderator, pembicara ilmiah dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelatihan dijalani di dalam maupun luar negeri seperti "*Intensive Course in Musculoskeletal Ultrasound*" di Jakarta (2008) , *Pre Congress Workshop : Interventional pain Workshop and Refresher Course 3rd Congress Association of Southeast ASIAN Pain Societies and Neuropathic Pain Special Interest Group* di Bali (2009), *Advanced Course and Workshop Latest Therapeutic Development in The Management of RA* di Jakarta (2012), dan Berpartisipasi dalam *ISCD Densitometry course the 4th PERDOSI* di Jakarta (2012). Disertasi beliau yang berjudul *The Application of Biochemical Marker Hyaluronic Acid serum for Assessing Therapeutic Effect of Diacerein* berhasil publish disebuah jurnal *The EULAR JOURNAL, Annals of the Rheumatic Disease* (June 2011. Vol 70 Supplement 3). Beliau juga mendapatkan HKI dan telah mendapatkan sertifikat paten obat Reumatik Asam Urat yang mengandung Ekstrak Daun Sidaguri (*Sida Rhombifolia L*) sejak 10 September 2020 melalui Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

Sustainable Tourism dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengentaskan Kemiskinan

Elmeida Effendy
Fakultas Kedokteran

1. Latar Belakang

Kepariwisataan, menurut Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin dan muncul sebagai wujud kebutuhan setiap individu dan negara, serta interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Kementrian Pariwisata, 2009).

Secara praktek telah membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan melalui pariwisata telah menjadi cara penting bagi daerah miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan merupakan model pembangunan daerah yang mendorong daerah miskin dengan sumber daya pariwisata yang lebih baik untuk mengembangkan ekonomi dan mencapai kemakmuran. Pengentasan kemiskinan dengan pariwisata adalah pendekatan pembangunan khusus sehingga terdapat sinergi dan hubungan yang baik antara pembangunan pariwisata dan pengentasan kemiskinan, yang akan menimbulkan dampak yang penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah miskin serta mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan (Wang and Cai, 2022; Yang et al., 2021).

Secara khusus, pariwisata internasional dipandang sebagai alat pengentasan kemiskinan di negara-negara kurang berkembang melalui sarana integrasi ekonomi dan globalisasi. Pertama, pariwisata internasional mendorong pengembangan infrastruktur domestik dan menciptakan banyak lapangan kerja lokal. Selain itu, pariwisata internasional juga membantu akumulasi sumber daya manusia dalam negeri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, khususnya di sektor jasa. Lebih penting lagi, pariwisata internasional merangsang terjadinya diversifikasi ekonomi, perubahan struktur dan tertiarisasi (Lagos and Wang, 2023).

Pariwisata telah memainkan peran yang semakin vital dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mancanegara meningkat 12,58% menjadi 15,81 juta, dengan kontribusi kas asing sebesar USD 16,1 miliar. Wisatawan domestik melakukan 303,4 juta perjalanan pada tahun yang sama, meningkat 12,37%, dengan total pengeluaran Rp. 291 triliun dan peningkatan belanja sebesar 17,9%. (Badan Pusat Statistik, 2019; Kementrian Pariwisata, 2019). Universitas Sumatera Utara (USU) telah

berkomitmen untuk memberikan advokasi bagi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. USU menjadi satu-satunya *Sustainable Tourism Observation* (STO) di Sumatera oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) (Evalisa Siregar, 2018).

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada kata *empowerment* yang berarti “penguatan” dan merupakan upaya untuk memenuhi potensi yang telah dimiliki masyarakat. Untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan mencapai potensinya secara maksimal, diperlukan suatu struktur organisasi yang mampu mengelolanya. Dalam wacana kehidupan sosial, konsep pemberdayaan senantiasa dikaitkan dengan konsep kemandirian dan diposisikan pada level kapasitas individu dan sosial. Pemberdayaan telah didefinisikan sebagai proses seseorang membuat keputusan dan kemudian secara konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Orang yang telah mencapai tujuan bersama diberdayakan oleh kemandirian mereka; bahkan lebih penting lagi bagi mereka untuk diberdayakan dengan upaya mereka sendiri, perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lain untuk memenuhi tujuan mereka (Aslinda et al., 2021; Atma Ras, 2013).

Pendekatan yang diharapkan adalah pendekatan dimana individu dapat diposisikan sebagai subjek daripada objek. Pemberdayaan adalah konsep yang memperluas kebebasan seseorang untuk memilih dan bertindak. Kebebasan ini sangat dibatasi bagi orang miskin karena ketidakmampuan mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka dan ketidakberdayaan mereka terhadap negara dan pasar. Karena kemiskinan memiliki banyak segi, orang miskin membutuhkan keterampilan baik secara individu (seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan) maupun kolektif (seperti bekerja sama untuk memecahkan masalah). Orang yang tidak berdaya dan anggota masyarakat miskin harus diberdayakan melalui proses pemberdayaan dengan memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapatkan sumber daya, dan mengubah cara pandang mereka. Sebaliknya, kelompok yang memiliki sumber kekuatan ini (kelompok dominan) harus mau berbagi pengetahuan, informasi, dan sumber daya dengan kelompok lain. Pemberdayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini berusaha untuk meringankan emosi ketidakberdayaan (impotensi) orang miskin ketika terlibat dengan struktur sosial dan politik. (Aslinda et al., 2021; Atma Ras, 2013).

Kemiskinan juga dikaitkan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental individu dibentuk oleh kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi di mana mereka dilahirkan, tumbuh, bekerja dan menua. Kemiskinan dan kekurangan sumber daya adalah penentu utama perkembangan sosial dan perilaku anak-anak serta kesehatan mental pada orang dewasa (Knifton and Inglis, 2020). Ekonomi dan kesehatan mental saling terkait dalam berbagai cara. Ekonomi menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Kemiskinan yang berdampak pada kesehatan mental bersifat dua arah dan kompleks. Di satu sisi, kesehatan mental juga memberikan dampak yang besar terhadap sistem ekonomi melalui konsekuensinya yang merusak,

seperti hilangnya produktivitas dan penggunaan sumber daya yang lebih berat. Di sisi lain, kerugian ekonomi dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya penyakit mental yang lebih besar yang disebabkan paparan terhadap faktor risiko (misalnya pengucilan sosial) dan akses yang lebih buruk ke faktor pendukung (misalnya pendidikan), atau spiral ke bawah yang kompleks (misalnya keterikatan kemiskinan, biaya perawatan, dan kesulitan pekerjaan) (Knapp and Wong, 2020).

2. Masalah

Pengaruh dinamis pariwisata terhadap kemiskinan terkait dengan manfaat jangka panjang pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pemulihan misi. Pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) di Indonesia masih jauh dari harapan dan cita-cita bangsa. Adanya kebijakan pembangunan di industri pariwisata, serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, belum sepenuhnya terwujud sehingga berdampak pada minimnya kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan, di sisi lain, tetap meluas, yang berdampak signifikan pada kegiatan dan ambisi pengentasan kemiskinan. (Heri Wahyudi, 2019; Zainuri et al., 2021).

3. Pemikiran pemecahan masalah

Pariwisata di Indonesia kini telah menjadi salah satu tumpuan perekonomian negara. Indonesia kini telah menjadi tujuan wisata yang terkenal tidak hanya di kalangan wisatawan lokal, tetapi juga di kalangan individu dari seluruh dunia. Perkembangan pariwisata berjalan seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan kawasan wisata tersebut untuk mendukung infrastruktur pariwisata setempat. Namun, keberadaan dan perkembangan pariwisata saat ini belum mampu memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat setempat. Banyak provinsi yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang belum mampu mengelola pariwisatanya sendiri sehingga sektor pariwisata lebih dikuasai oleh investor.

4. Strategi pemecahan masalah

Penggunaan *Community Based Tourism* (CBT), yang merupakan konsep wisata berbasis komunitas, merupakan konsep turisme dimana masyarakat diberdayakan untuk mengelola objek wisatanya sendiri. CBT memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- a. membentuk pariwisata, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk mengontrol dan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
- b. orang yang tidak terlibat langsung dalam keuntungan usaha pariwisata; dan

- c. menuntut pemberdayaan politik, demokratisasi, dan distribusi manfaat bagi masyarakat tertinggal di pedesaan.

CBT mengutamakan pendekatan pengembangan pariwisata yang mengutamakan masyarakat lokal (baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam industri pariwisata) berupa pemberian kesempatan (akses) dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, yang mengarah pada pemberdayaan politik melalui kehidupan yang lebih nyaman, termasuk berbagi manfaat dari kegiatan pariwisata yang lebih adil bagi masyarakat setempat.

Gagasan untuk mengadopsi CBT terkait dengan manfaat yang diterima dan adanya kegiatan perencanaan bantuan yang berpihak pada komunitas lokal dan organisasi lain yang memiliki kepentingan/kepentingan, sehingga menawarkan kontrol yang lebih baik atas proses sosial dalam mencapai kesejahteraan. Setiap komunitas harus didorong untuk mengembangkan tujuannya sendiri dan inisiatif wisata langsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akibatnya, diperlukan perencanaan sedemikian rupa sehingga masalah sosial dan lingkungan dipertimbangkan, dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan sekaligus memprioritaskan manfaat positif bagi penduduk lokal (A'inun et al., 2015).

5. Rencana Tindak Lanjut

Perwujudan dari penerapan konsep CBT adalah pertumbuhan pariwisata, dimana individu dalam industri pariwisata akan mengembangkan potensinya, baik dari segi sumber daya alam, budaya maupun sumber daya manusia/masyarakat lokal. Pengembangan dan penerapan CBT harus memperhatikan berbagai dimensi seperti :

1. Dimensi ekonomi: dana menjadi sumber utama penting pada setiap penerapan suatu sistem yang diharapkan dapat mengembangkan masyarakat, terciptanya lapangan kerja khususnya di sektor pariwisata, dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat dari sektor pariwisata yang dikelola.
2. Dimensi sosial: menciptakan lingkungan sosial yang baik dan nyaman akan membangun penguatan organisasi komunitas yang memberikan dampak baik terutama dalam sektor pariwisata. Hal ini dapat berupa upaya-upaya dalam peningkatan kualitas hidup, pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, generasi muda dan tua, serta membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan komunitas.
3. Dimensi budaya: adanya keanekaragaman budaya menjadi penilaian penting dalam menerapkan CBT. Masyarakat diarahkan untuk menghormati perbedaan budaya, membantu perkembangan pertukaran budaya, juga pembangunan budaya yang melekat dalam budaya lokal setempat.
4. Dimensi lingkungan: kemampuan daya dukung lingkungan atau yang disebut pula dengan *Carrying Capacity Area* yang berarti kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung kehidupan makhluk yang ada didalamnya secara berkelanjutan dan dipengaruhi oleh 3 faktor berupa

ketersediaan makanan, jumlah populasi, dan jumlah makanan di dalam suatu lingkungan. Masyarakat juga dapat dipaparkan dengan pengaturan pembuangan sampah, peningkatan kepedulian, dan jalinan kerjasama dalam upaya peningkatan sector pariwisata.

5. Dimensi politik: masyarakat setempat atau penduduk lokal diharapkan berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai upaya termasuk dalam bidang politik sehingga dapat mewujudkan harapan pengembangan suatu sektor pariwisata berupa jaminan hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam dan adanya peningkatan dalam memegang kekuasaan di komunitas.

6. Kesimpulan dan saran

Praktek telah membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan melalui pariwisata telah menjadi cara penting bagi daerah miskin untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan merupakan model pembangunan daerah yang mendorong daerah miskin dengan sumber daya pariwisata yang lebih baik untuk mengembangkan ekonomi dan mencapai kemakmuran. Terjadinya kemiskinan juga telah dikaitkan dengan terganggunya kesehatan mental. Kesehatan mental individu dibentuk oleh kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi tempat mereka dilahirkan, tumbuh, berkembang, bekerja dan menua. Akibatnya, masyarakat harus didorong untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah mereka dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Perencanaan dan bisnis pariwisata harus berfokus pada wisatawan lokal dan asing, serta penduduk setempat. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pariwisata diharapkan menjadi salah satu upaya dalam pemberantasan kemiskinan, sehingga seiring dengan perbaikan ekonomi, kehidupan semakin baik dan memberi dampak terhadap terbentuknya kesehatan mental yang baik pula.

Daftar Pustaka

- A'inun, F., Krisnani, H., Darwis, R.S., 2015. Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Prosiding Ks: Riset & Pkm* 2, 301–444.
- Arifin, A.P.R., 2017. Pendekatan Community Based Tourism dalam Membina Hubungan Komunitas di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Visi Komunikasi* 16, 111–130.
- Aslinda, A., Zainal, H., Siraj, M.L., 2021. Reducing poverty through community empowerment with integrated coconut product program in Bujjulu District of Gowa Regency. *Linguistics and Culture Review* 6, 57–64. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS1.1901>
- Atma Ras, 2013. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *SOCIUS XIV*, 56–63.

- Badan Pusat Statistik, 2019. Berita Resmi Statistik No.12/02/Th.XXII: Perkembangan pariwisata dan transportasi nasional Desember 2018. Jakarta.
- Evalisa Siregar, 2018. USU jadi pengamatan pariwisata berkelanjutan [WWW Document]. ANTARA Sumut.
- Heri Wahyudi, 2019. Pariwisata, Pengentasan Kemiskinan Dan MDGs. UPBJJ-UT.
- Kementrian Pariwisata, 2019. Siaran Pers: Menpar proyeksikan devisa pariwisata akan tembus 18 miliar dolar AS.
- Kementrian Pariwisata, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 .
- Knapp, M., Wong, G., 2020. Economics and mental health: the current scenario. *World Psychiatry* 19, 3–14. <https://doi.org/10.1002/wps.20692>
- Knifton, L., Inglis, G., 2020. Poverty and mental health: policy, practice and research implications. *BJPsych Bull* 44, 193–196. <https://doi.org/10.1192/bjb.2020.78>
- Lagos, K., Wang, Y., 2023. International Tourism and Poverty Alleviation: Cross-Country Evidence Using Panel Quantile Fixed Effects Approach. *J Travel Res* 62, 1347–1371. <https://doi.org/10.1177/00472875221119978>
- Wang, X., Cai, P., 2022. The relationship between tourism development and multidimensional poverty reduction: A decoupling analysis. *Qual Quant* 56, 2501–2518. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01233-4>
- Yang, J., Wu, Y., Wang, J., Wan, C., Wu, Q., 2021. A Study on the Efficiency of Tourism Poverty Alleviation in Ethnic Regions Based on the Staged DEA Model. *Front Psychol* 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.642966>
- Zainuri, Z., Priyono, T.H., Varazizah, A., 2021. Dampak Pariwisata Terhadap Tingkat Kemiskinan di Lima Negara ASEAN. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 8, 138. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i2.26771>